

**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
(RLPPD)  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2019**

**A. CAPAIAN KINERJA MAKRO**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 6, Capaian Kinerja Makro meliputi indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan ketimpangan pendapatan.

**a. Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Komponen Indeks Pembangunan Manusia sebagai berikut:

1. dimensi kesehatan, angka harapan hidup waktu lahir Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 sebesar 70,50.
2. dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf (persentase kemampuan membaca dan menulis penduduk berumur 15 Tahun ke atas) dan rata-rata lama sekolah, capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk angka melek huruf Tahun 2019 sebesar 98,09 dan rata-rata lama sekolah sebesar 7,98.
3. dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak, capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk rata-rata besarnya pengeluaran per kapita Tahun 2019 sebesar RP. 12.959.000,- /Orang/Tahun.

Capaian IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2019 cenderung terus meningkat tiap tahunnya.

**b. Angka Kemiskinan**

Dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basicneedsapproach*), kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari ditambah kebutuhan minimum non makanan yang mencakup perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan dinyatakan sebagai penduduk miskin atau persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan.

Penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang periode tahun 2016 - 2019 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin sebanyak 4,83 persen dari total jumlah penduduk, turun menjadi 4,50 persen pada tahun 2019.

**c. Angka Pengangguran**

Persentase pengangguran terbuka (TPT) pada Tahun 2019 sebesar 3,62 persen, mengalami penurunan sebesar 0,03 persen dari kondisi Tahun 2018 yang semula berada di angka 3,65. Angka pengangguran diperkirakan dapat ditekan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melalui upaya penciptaan peluang lapangan pekerjaan dan usaha diarahkan untuk menciptakan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja diharapkan akan berdampak pada penyerapan angkatan kerja. Demikian juga pertumbuhan sektor pertanian, pariwisata, kelautan serta membaiknya infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan dan listrik akan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap peningkatan angkatan kerja.

**d. Pertumbuhan Ekonomi**

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator dari keberhasilan pembangunan ekonomi yang paling mendasar dan digunakan sampai saat ini. Umumnya pertumbuhan ekonomi diukur dengan perubahan atau kenaikan PDRB, yaitu keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam satu tahun. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2017 sebesar 4,47 persen meningkat dari Tahun 2016 sebesar 4,11 persen dan melambat menjadi sebesar 4,45 persen pada Tahun 2018 serta 3,32 pada tahun 2019.

**e. Pendapatan Per Kapita**

PDRB perkapita adalah gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Data statistik ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Jadi besarnya PDRB perkapita tersebut sangat dipengaruhi oleh kedua variabel diatas.

Dalam kurun waktu 2016-2018 atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2016, PDRB perkapita sebesar Rp46.402.468,- meningkat menjadi sebesar Rp48.824.521,- pada Tahun 2017 dan menjadi sebesar Rp50.051.829,- pada Tahun 2018. Sejalan dengan perkembangan perekonomian daerah yang tumbuh positif, PDRB perkapita pada Tahun 2019-2020 diperkirakan akan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp53.015.000,- dan sebesar Rp55.401.000,-.

- f. Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini)  
Koefisien Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2014 sebesar 0,295 hingga tahun 2019 sebesar 0,262. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kecenderungan relatif rendah dimana semakin mendekati 0 distribusi pendapatan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin merata.

## **B. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR**

### **a. Pendidikan**

#### 1. Perangkat Daerah Pelaksana

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

#### 2. Program dan Kegiatan

**Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah**, terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan, yaitu:

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)
- Pelaksanaan Lomba-Lomba Siswa dan PTK Tingkat Provinsi
- Pemberian Beasiswa Kepada Siswa/Mahasiswa Tidak Mampu dan/atau Berprestasi
- Pelaksanaan Kegiatan Siswa dan PTK Tingkat Nasional
- Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Rekonsiliasi Keuangan BOS APBD, APBN, IPP dan Bantuan Pemerintah.

**Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas**, terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yaitu :

- Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMA
- Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMA
- Pengembangan Kurikulum SMA
- Pemberian Beasiswa Siswa SMA
- Pengembangan Sarana Pendidikan SMA (DAK Reguler)

**Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan**, terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yaitu :

- Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMK
- Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMK
- Pengembangan Kurikulum SMK
- Pemberian Beasiswa Siswa SMK

- Pengembangan Sarana Pendidikan SMK (DAK Penugasan)
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus**, terdiri dari 5 (lima) Kegiatan, yaitu :
  - Peningkatan sarana/prasarana dan pengembangan kelembagaan pendidikan khusus
  - Peningkatan kualitas kesiswaan Pendidikan Khusus
  - Pengembangan kurikulum pendidikan khusus
  - Peningkatan Fungsi Pelayanan Pusat Layanan Autis
  - Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus (DAK Non Fisik)
- Program Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan**, terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan, yaitu:
  - Peningkatan Mutu PTK SMA
  - Peningkatan Mutu PTK SMK
  - Peningkatan Mutu PTK SLB
- Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka**, terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) Kegiatan, yaitu:
  - Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka
  - Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalpinang
  - Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Pangkalpinang
  - Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Pangkalpinang
  - Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 4 Pangkalpinang
  - Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 5 Pangkalpinang
  - Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kota Pangkalpinang
  - Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Kota Pangkalpinang
  - Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 3 Kota Pangkalpinang
  - Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 4 Kota Pangkalpinang
  - Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Pangkalpinang
  - Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungailiat, Bangka
  - Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Sungailiat, Bangka
  - Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mendo Barat, Bangka
  - Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Belinyu, Bangka
  - Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Bakam, Bangka

- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Bakam, Kabupaten Bangka
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Belinyu, Kabupaten Bangka
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Mendobarat, Kabupaten Bangka
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Mendobarat, Kabupaten Bangka
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pemali, Kabupaten Bangka
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Puding Besar, Kabupaten Bangka
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Riau Silip, Kabupaten Bangka
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2, puding besar
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri, sungailiat

**Program Pelayanan Pendidikan Wilayah BangkaBarat**, terdiri dari 13 (tiga belas) Kegiatan, yaitu :

- Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kabupaten Bangka Barat
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mentok, Bangka Barat
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa, Bangka Barat
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Parittiga, Bangka Barat
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tempilang, Bangka Barat
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Teritip, Bangka Barat
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Jebus, Kabupaten Bangka Barat
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Muntok, Kabupaten Bangka Barat
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat

- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Muntok
- Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan**, terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) Kegiatan, yaitu :
- Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalanbaru, Bangka Tengah
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangkatis, Bangka Tengah
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungaiselan, Bangka Tengah
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lubukbesar, Kabupaten Bangka Tengah
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Namang, Kabupaten Bangka Tengah
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kep. Pongok, Kabupaten Bangka Selatan
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Payung, Kabupaten Bangka Selatan
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Airgegas, Bangka Selatan

- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Payung, Bangka Selatan
  - Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangrimba, Bangka Selatan
  - Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Toboali, Bangka Selatan
  - Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tukak Sadai, Bangka Selatan
  - Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pulau Besar, Bangka Selatan
  - Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri Laskar Pelangi (SKO)
  - Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB N Toboali, Kabupaten Bangka Selatan
  - Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB N Koba
- Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur**, terdiri dari 88 (delapan puluh delapan) Kegiatan, yaitu :
- Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kabupaten Belitung
  - Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Membalong, Kabupaten Belitung
  - Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sijuk, Kabupaten Belitung
  - Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung
  - Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung
  - Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Badau, Belitung
  - Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Selat Nasik, Belitung
  - Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tanjungpandan, Belitung
  - Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Tanjungpandan, Belitung
  - Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Tanjungpandan, Belitung
  - Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Damar, Kabupaten Belitung Timur
  - Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Gantung, Kabupaten Belitung Timur
  - Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 KelapaKampit, Kabupaten Belitung Timur
  - Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur

- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpangpesak, Kabupaten Belitung Timur
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Dendang, Belitung Timur
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit, Belitung Timur
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Manggar, Belitung Timur
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Renggiang, Belitung Timur
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Manggar, Kabupaten Belitung Timur

**Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)**, terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) Kegiatan, yaitu :

- Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Pangkalpinang (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Sungailiat (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Mentok (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Toboali (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Koba (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Manggar (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Kota Pangkalpinang (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Kota Pangkalpinang (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 3 Kota Pangkalpinang (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 4 Kota Pangkalpinang (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 3 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 4 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 5 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)



- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Bakam, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Mendobarat, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Belinyu, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Mendobarat, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Pemali, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Puding Besar, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Puding Besar, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Riau Silip, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Bakam, Bangka (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Belinyu, Bangka (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Mendo Barat, Bangka (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Sungailiat, Bangka (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Sungailiat, Bangka (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Jebus, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Muntok, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Kelapa, Bangka Barat (DAK Non Fisik)

- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Mentok, Bangka Barat (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Parittiga, Bangka Barat (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Tempilang, Bangka Barat (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Lubukbesar, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Namang, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Pangkalanbaru, Bangka Tengah (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Simpangkatis, Bangka Tengah (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Sungaiselan, Bangka Tengah (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Kep. Pongok, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Payung, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)

- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Airgegas , Bangka Selatan (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Payung, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Simpangrimba, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Toboali, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Tukak Sadai, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Membalong, Kabupaten Belitung (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Sijuk, Kabupaten Belitung (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Badau, Belitung (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Selat Nasik, Belitung (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Tanjungpandan, Belitung (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Tanjungpandan, Belitung (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 3 Tanjungpandan, Belitung (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Damar, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Gantung, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Simpangpesak, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Dendang, Belitung Timur (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit, Belitung Timur (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Manggar, Belitung Timur (DAK Non Fisik)

- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Simpang Renggang, Belitung Timur (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Pulau Besar, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Simpang Teritip, Bangka Barat (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS di SMA Keberbakatan Olahraga
- Pengelolaan Dana BOS Afirmasi (DAK Non Fisik)
- Pengelolaan Dana BOS Kinerja (DAK Non Fisik)

### 3. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Capaian Target Kinerja Tahun 2019 (Data Terlampir)

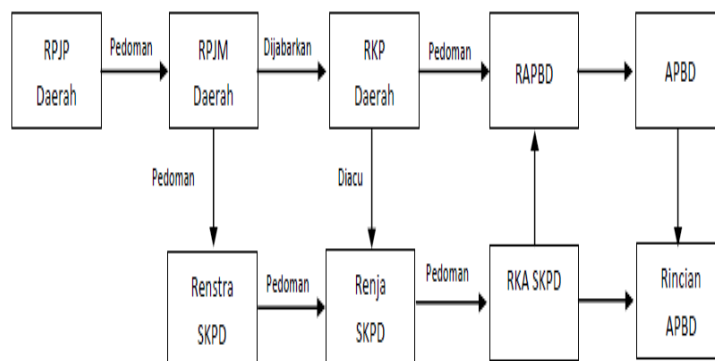
### 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	395	0	395
		Gol. III	1494	173	1667
		Gol. II	107	0	107
		Gol. I	8	0	8
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	0	0	0
		S2	116	0	116
		S1	1661	173	1834
		D. IV	6	0	6
		D. III	88	0	88
		D. I	0	0	0
		SMA/ sederajat	116	0	116
		SMP/ sederajat	3	0	3
		SD/ sederajat	4	0	4
III.	Berdasarkan Jabatan	<b>Struktural:</b>			
		Eselon II	1	0	1
		Eselon III	5	0	5
		Eselon IV	86	0	86
		<b>Fungsional:</b>			
		Tertentu	1638	0	1638
		Umum	447	0	447
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>2004</b>	<b>173</b>	<b>2177</b>

### 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWA (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
288.902.309.020	30.546.074.000	175.546.850.029	92.468.447.813	587.463.680.862	521.492.99.067,-	88,77%	Dinas Pendidikan

## 6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



## 7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, cukup atau Kurang)

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
-	-	√	-

## 8. Permasalahan dan Solusi

### Permasalahan

- Masih rendahnya mutu pendidikan menengah dan pendidikan khusus terutama dikarenakan kurangnya sarana prasarana serta guru dan tenaga kependidikan
- Belum optimalnya akses layanan pendidikan menengah dan akses layanan bagi anak berkebutuhan khusus di SLB

### Solusi

- Solusi pemenuhan sarana prasarana dan gtk sesuai standar yg telah ditetapkan;
- Solusi pembangunan USB, ruang kelas baru dan beasiswa bagi siswa tidak mampu

## b. Kesehatan

### 1. Perangkat Daerah Pelaksana

Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### 2. Program dan Kegiatan

#### **Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah**

- Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan,
- Kegiatan Peningkatan Pelayanan Uptd Balai Labkes.
- Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

### **Program Kesehatan Masyarakat**

- Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat
- Kegiatan Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga
- Kegiatan Penurunan Kematian Ibu
- Kegiatan Penurunan Angka Kematian Bayi
- Kegiatan Peningkatan Kesehatan Gizi Anak Dan Keluarga
- Kegiatan Peningkatan Penyehatan Lingkungan
- Kegiatan Peningkatan Kesehatan Kerja Dan Olahraga
- Kegiatan Bok Provinsi (Dak Non Fisik)
- Kegiatan Pengadaan Makanan Tambahan Ibu Hamil (Dak Non Fisik)
- Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit.
- Kegiatan Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular Tb
- Kegiatan Peningkatan Pencegahan Dan Pengendalian Hiv
- Kegiatan Penanganan Penyakit Menular Lainnya (Hepatitis, Ispa, Diare, Kusta, Filariasis, Dbd, Zoonosis. )
- Kegiatan Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Kanker
- Kegiatan Peningkatan Pencegahan Penyakit Tidak Menular Lainnya (Tekanan Darah Tinggi, Obesitas, Diabetes Millitus )
- Kegiatan Peningkatan Penanganan Penyakit Kesehatan Jiwa
- Kegiatan Peningkatan Surveilans, Imunisasi, Dan Kesehatan Situasi Khusus

### **Program Pelayanan Kesehatan**

- Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer
- Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
- Kegiatan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- Kegiatan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Traditional

### **Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan**

- Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Sdmk)
- Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian
- Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Alkes Dan Pkrt.
- Program Pelayanan Tehnis Laboratorium Kesehatan'
- Kegiatan Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Tehnis Laboratorium Kesehatan.

3. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib  
Tidak ada

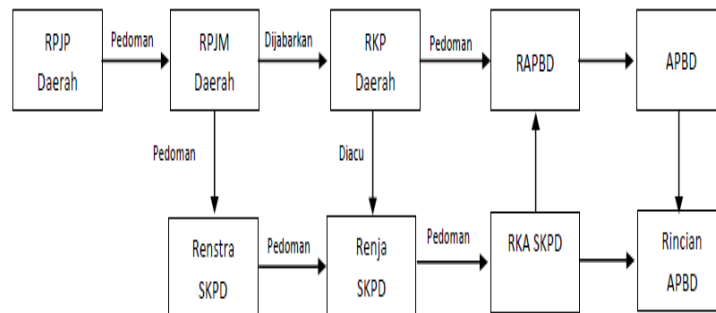
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	51	-	51
		Gol. III	408	-	408
		Gol. II	125	-	125
		Gol. I	1	-	1
		<b>Total</b>			
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	1	-	1
		S2	70	-	70
		S1	220	-	220
		D. IV	11	-	11
		D. III	272	-	272
		D. I	1	-	1
		SMA/ sederajat	42	-	42
		SMP/ sederajat	2	-	2
		SD/ sederajat	2	-	2
		<b>Total</b>			
III.	Berdasarkan Jabatan	<b>Struktural:</b>			
		Eselon II, III, IV	50	-	50
		<b>Fungsional:</b>			
		Tertentu	332	-	332
		Umum	239	-	239
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>621</b>

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWA (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
85.522.986.724	7.551.058.000	125.456.590.650	68.789.908.110	286.600.214.284	252.408.715.274,11	88,08	Dinkes

6. Kesesuain Perencanaan Pembangunan Daerah



7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, cukup atau Kurang)

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
-	-	-	-

8. Permasalahan dan Solusi

**Permasalahan**

- Realisasi keuangan kegiatan sebesar Rp 824.338.860 (Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah) atau sebesar 88,77% dikarenakan ada beberapa *item* penggunaan anggaran berdasarkan *riil cost*, keterbatasan sumberdaya manusia yang ada, sesuai Standar Biaya Umum (SBU) dan ada peserta yang tidak hadir.
- Adanya kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan kegiatan, DPPA SKPD TA 2019 disahkan tanggal 27 September 2019 dan diterima tanggal 1 Nopember 2019;
- Belum tercapainya target (100%) cakupan kunjungan ibu Hamil K4 86,87% menurun dari tahun 2018 sejumlah 88,65%. Solusi : koordinasi lintas program dan lintas sektor; meningkatkan kapasitas teknis SDM kesehatan, Mengoptimalkan pelaksanaan kelas ibu dan P4K di setiap desa/kelurahan; Penguatan manajemen pencatatan dan pelaporan di fasyankes swasta;
- Belum tercapainya target (100%) cakupan persalinan yang ditolong di fasilitas pelayanan kesehatan/fasyankes (84,04%). Solusi : Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat tentang persalinan di fasyankes perlu ditingkatkan termasuk mutu fasilitas pelayanan kesehatan.
- Kasus kematian ibu 36 kasus/26.213 KH menurun dari tahun sebelumnya (43 kasus/27.364 KH). Solusi : advokasi ke stakeholder terkait; koordinasi lintas program dan lintas sektor; meningkatkan kapasitas teknis SDM kesehatan, meningkatkan mutu pelayanan sesuai standar, mengembangkan sistem rujukan di semua fasyankes; Audit Maternal Perinatal dan Surveilans Kematian Ibu.
- Meningkatnya kasus kematian neonatus sebesar 126 kasus dari kasustahun sebelumnya (114 kasus). Solusi : advokasi ke stakeholder terkait; koordinasi lintas program dan lintas sektor; meningkatkan kapasitas teknis SDM kesehatan, mengembangkan sistem rujukan di semua fasyankes; Audit Maternal Perinatal;
- Meningkatnya kasus kematian neonatus sebesar 143 kasus dari kasus tahun sebelumnya (126 kasus), kematian bayi sebesar 188 kasus (7,17/1000 KH) meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 6,06/1000 KH. Solusi : advokasi ke stakeholder terkait; koordinasi lintas program dan lintas sektor; meningkatkan kapasitas teknis SDM kesehatan, mengembangkan sistem rujukan di semua fasyankes; Audit Maternal Perinatal;



- Umur kematian neonatus terbesar terdapat pada usia kurang dari 1 minggu (117 kasus, 81,81%). Solusi : Meningkatkan kapasitas teknis SDM kesehatan, Meningkatkan kualitas Kunjungan Neonatus dengan penerapan Manajemen Terpadu Bayi Muda, mutu fasilitas pelayanan kesehatan;
- Kasus lahir mati yaitu 163 kasus menurun dari tahun 2018 sejumlah 176 kasus. Solusi : Meningkatkan kualitas Antenatal Terpadu; Pengenalan Tanda Bahaya.
- Adanya kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan kegiatan, DPPA SKPD TA 2019 disahkan tanggal 27 September 2019 dan diterima tanggal 15 Oktober 2019;
- Realisasi keuangan kegiatan sebesar Rp746.652.900 (Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah) atau sebesar 85,74% dikarenakan ada beberapa *item* penggunaan anggaran berdasarkan anggaran berdasarkan *riil cost* keterbatasan sumberdaya manusia yang ada, sesuai Standar Biaya Umum (SBU) dan ada peserta yang tidak hadir.
- Meningkatnya kasus kematian neonatus sebesar 143 kasus dari kasus tahun sebelumnya (126 kasus), kematian bayi sebesar 188 kasus (7,17/1000 KH) meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 6,06/1000 KH. Solusi : advokasi ke stakeholder terkait; koordinasi lintas program dan lintas sektor; meningkatkan kapasitas teknis SDM kesehatan, mengembangkan sistem rujukan di semua fasyankes; Audit Maternal Perinatal;
- Umur kematian neonatus terbesar terdapat pada usia kurang dari 1 minggu (117 kasus, 81,81%). Solusi : Meningkatkan kapasitas teknis SDM kesehatan, Meningkatkan kualitas Kunjungan Neonatus dengan penerapan Manajemen Terpadu Bayi Muda, mutu fasilitas pelayanan kesehatan;
- Kasus lahir mati yaitu 163 kasus menurun dari tahun 2018 sejumlah 176 kasus. Solusi : Meningkatkan kualitas Antenatal Terpadu; Pengenalan Tanda Bahaya;
- Pencapaian program berdasarkan data tahun 2019 sudah dibawah target, tetapi masih perlu ditingkatkan dari sisi kualitas: persentase balita underweight 2019 sebesar 5,62% menurun dari tahun 2018 sebesar 6,69% di bawah target 17%, persentase balita stunting 2019 sebesar 2,33% menurun dari tahun 2018 sebesar 12,1% di bawah target 28%, persentase balita wasting 2019 sebesar 2,51% menurun dari tahun 2019 sebesar 3% di bawah target 9,5%.
- Persentase balita yang ditimbang berat badannya 71,93%, persentase ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan 71,35%, persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapat makanan tambahan 92,15%, persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan 87,40%, persentase remaja putri mendapat TTD 56,65%, persentase ibu nifas mendapat kapsul vitamin A 72,01%, persentase bayi baru lahir yang mendapat IMD 78,89%.

- Permasalahan terkait program berikut solusi:
- Belum tercapainya target program berdasarkan data tahun 2019: Persentase balita yang ditimbang berat badannya 67,52% meningkat dari tahun 2018 sebesar 67,46%, Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) 7,72% menurun dari tahun 2018 sejumlah 8,3%, yang mendapat makanan tambahan 98,28% meningkat dari tahun 2018 sejumlah 95,90%, angka stunting (sumber laporan TW IV dinas kesehatan kabupaten/kota) sejumlah 2,33% menurun dari tahun 2018 sejumlah 12,1%

**Solusi :**

**a) Intervensi Gizi Spesifik :**

- Suplementasi Gizi (TTD, Makanan Tambahan Bumil KEK dan Balita, Vitamin A)
- Pendidikan Gizi
- Promosi PMBA
- Pemantauan Pertumbuhan Perkembangan
- Tatalaksana Gizi Buruk
- Peningkatan Kapasitas SDM

**b) Intervensi Gizi Sensitif :**

- Melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait dalam penanganan masalah gizi
- Meningkatkan peran serta masyarakat bersama kader dan keluarga
- Pendekatan dengan Tim RAD Pangan Daerah
- Pendekatan melalui Sekolah.
- Pendekatan ke Rumah Sakit dalam menetapkan kebijakan terkait pemberian ASI dan susu formula.
- Pendekatan ke Rumah Sakit dalam menetapkan pelaksanaan IMD (Inisiasi Menyusu Dini).
- Perbaikan sanitasi
- Penguatan Tim Penurunan Stunting Provinsi.

**Permasalahan program peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV:**

- Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap HIV-AIDS dan IMS.
- Kurangnya SDM terlatih dan sarana prasarana untuk pelaksanaan layanan HIV-AIDS dan IMS di fasyankes.
- Kurangnya anggaran kab./kota dan fasyankes dalam mendukung pelaksanaan layanan HIV-AIDS dan IMS.
- Kurangnya koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan program HIV-AIDS dan IMS

**Solusi:**

- Peningkatan KIE kepada masyarakat.
- Advokasi ke pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan layanan HIV-AIDS dan IMS.
- Mengoptimalkan kegiatan program peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV.

- Memperkuat koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan program HIV-AIDS dan IMS.

**Permasalahan program Kanker :**

- Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam deteksi dini kanker serviks dan payudara
- Masih kurangnya pengetahuan masyarakat terutama di daerah pedesaan yang belum tersentuh informasi tentang bahaya kanker serviks dan payudara
- Persediaan alat dan bahan habis pakai yang masih belum *continue* (terus menerus)
- Kerjasama lintas sektor yang belum maksimal

**Solusi :**

- Peningkatan KIE kepada masyarakat
- Mengoptimalkan kegiatan posbindu PTM
- Mengoptimalkan penggunaan dana yang sudah tersedia sekaligus menggalang kemitraan dengan pihak terkait

**Permasalahan program Kesehatan Jiwa dan Napza :**

- Belum semua Kabupaten/Kota membentuk TPKJM, sehingga koordinasi dengan lintas sektor terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa masih belum optimal
- Pengelolaan ketersediaan obat program jiwa belum maksimal
- Masih kurangnya tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan dan IPWL
- Kurangnya promosi kepada masyarakat tentang layanan IPWL

**Solusi :**

- Pembentukan TPKJM di Semua Kabupaten/Kota
- Meningkatkan koordinasi dengan bagian farmasi serta RSJD tentang ketersediaan obat program kesehatan jiwa
- Peningkatan KIE kepada masyarakat
- Mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan IPWL
- Mengoptimalkan penggunaan dana yang sudah tersedia sekaligus menggalang kemitraan dengan lintas sector

**Permasalahan Penanganan Penyakit Menular Lainnya:**

- Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang penyakit kusta dan masih tingginya stigma negatif terhadap penderita kusta
- Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit Hepatitis, khususnya Hepatitis B.
- Belum semua Ibu Hamil melakukan deteksi dini Hepatitis B pada setiap kehamilan terutama pada usis kehamilan trimester 1.
- Masih ada Tenaga Kesehatan di Kab./Kota yang belum memiliki kompetensi dalam melakukan Deteksi Dini Hepatitis

**Solusi :**

- Seminar kusta / sosialisasi tentang penyakit kusta
- Seminar Hepatitis

- Sosialisasi Triple Eliminasi
- Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Deteksi Dini Hepatitis

**Permasalahan program PTM :**

- Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam deteksi faktor resiko penyakit tidak menular
- Persediaan alat dan bahan habis pakai yang masih belum *continue* (terus menerus)

**Solusi :**

- Peningkatan KIE kepada masyarakat
- Mengoptimalkan kegiatan posbindu PTM
- Mengoptimalkan penggunaan dana yang sudah tersedia sekaligus menggalang kemitraan dengan pihak swasta
- Belanja paket/ pengiriman tidak terealisasi karena barang Logistik imunisasi dan KIE di jemput langsung ke provinsi oleh pengelola program dari kabupaten/kota dan pengiriman specimen tidak semuanya kasus-kasus penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) dikirim menggunakan dana APBD karena sebagian besar menggunakan dana dekonsentrasi.
- Pertemuan evaluasi imunisasi PCV tidak terlealisasi 100% dana karena narasumber pusat tidak hadir
- Pengadaan pada program imunisasi terjadi penyesuaian harga pada pengadaan.

**Permasalahan Program Tuberkulosis:**

- Masih adanya stigma masyarakat terhadap penyakit Tuberkulosis
- Masih kurangnya sarana prasarana untuk pemeriksaan tuberkulosis di fasyankes.
- Anggaran kabupaten/kota dan fasyankes dalam mendukung penanggulangan tuberkulosis kurang maksimal.
- Kurangnya koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan penanggulangan tuberkulosis

**Solusi :**

- Peningkatan KIE kepada masyarakat.
- Mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam rangka peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit tuberkulosis.
- Advokasi ke pemerintah daerah untuk meningkatkan anggaran penanggulangan tuberkulosis.
- Memperkuat koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan program tuberkulosis.
- Terjadi kenaikan biaya transportasi udara. Alokasi belanja untuk biaya transportasi khusus perjalanan dinas menggunakan pesawat udara tidak sesuai dengan pengeluaran riil peserta dan narasumber. Sehingga harus dilakukan revisi anggaran ke dalam APBD Perubahan.
- Indikator keluaran pada target kinerja tidak sesuai dengan uraian target sasaran dalam DPA/DPPA, sehingga capaian realisasi melebihi target

kinerja yang ditentukan. Hal ini terjadi karena usulan dari pelaksana kegiatan tidak terinput pada APBD Perubahan.

- Dilakukan penyesuaian penggunaan anggaran pagu dengan pengeluaran riil.
- Pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan masih belum fokus dan terencana dengan baik, karena dipengaruhi oleh komitmen program dan anggaran yang belum mendukung baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- Uraian permasalahan atau hambatan berdasarkan realisasi anggaran kegiatan dijelaskan pada lampiran laporan ini.

### **c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

#### **1. Perangkat Daerah Pelaksana**

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### **2. Program dan Kegiatan**

##### **Program Kebinamargaan**

- Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan
- Kegiatan Pembangunan Jalan
- Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan
- Kegiatan Pembangunan Jembatan
- Kegiatan Pengadaan Alat-alat Berat
- Kegiatan Inspeksi Kondisi jalan
- Kegiatan Inspeksi Kondisi jembatan
- Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Batu Rusa II
- Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
- Kegiatan Pembangunan Jalan (DAK)
- Kegiatan Pemeliharaan Berkala jalan
- Kegiatan Pengadaan Alat-alat Laboratorium
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan
- Kegiatan Pembangunan Jalan (DAK Reguler)

##### **Program Pengembangan Sumber Daya Air**

- Kegiatan Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali banjir
- Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
- Kegiatan Pemberdayaan Petani Pemakai Air
- Kegiatan Perencanaan Turap/talud/bonjong
- Kegiatan Konservasi Sumber Air
- Kegiatan Pembersihan/rehabilitasi/Normalisasi/Sungai/kali
- Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa

- Kegiatan Peningkatan Capaian Kinerja Realisasi Bidang Sumber Daya Air
- Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)

**Program Penataan Ruang dan Pertanahan**

- Kegiatan Kajian Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Kegiatan Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi sesuai RTRW Provinsi Kep. Bangka Belitung
- Kegiatan Survey Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Provinsi Kep. Bangka Belitung
- Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang

**Program Pembinaan Jasa Konstruksi**

- Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Provinsi
- Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi

**Program Pengawasan dan Peralatan PUPR**

- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pengawasan dan Peralatan
- Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat
- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Peralatan Workshop
- Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

3. Tingkat pencapaian urusan wajib Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :
  - a. Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap sebesar 92,23%
  - b. Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi 24,92%
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

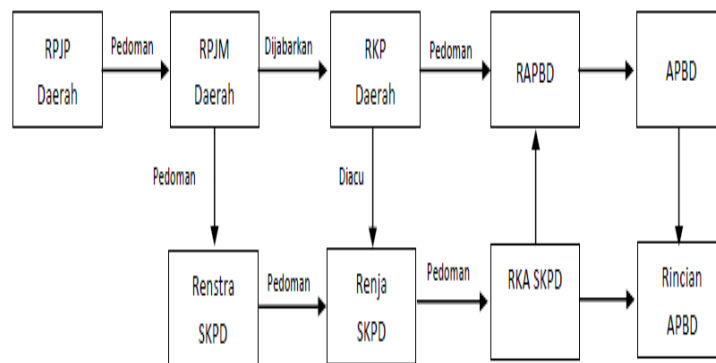
No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	7	-	7
		Gol. III	101	13	114
		Gol. II	37	4	41
		Gol. I	1	-	1
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	
		S2	22	-	22
		S1	68	13	81
		D. IV	-	-	
		D. III	23	4	27
		D. I	-	-	
		SMA/ sederajat	36	-	36
		SMP/ sederajat	1	-	1
		SD/ sederajat	-	-	

III.	Berdasarkan Jabatan	<b>Struktural:</b>			
		Eselon II	1		1
		Eselon III	6		6
		Eselon IV	16		16
		<b>Fungsional:</b>			
		Tertentu	8	6	14
		Umum	115	11	126
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>163</b>

## 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWA (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20.618.840.703	1.887.500.000	57.550.857.000	253.148.756.000	333.205.953.703	317.606.301.428,26	95,32	Dinas PUPR

## 6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



## 7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, cukup atau Kurang)

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
-	-	√	-

### d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

#### 1. Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Urusan Wajib Perumahan adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### 2. Program dan Kegiatan

##### Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Pelayanan Admistrasi Perkantoran
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

**Program Keciptakarya dan Permukiman**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman
  - Peningkatan/Perluasan Jaringan Distribusi Air Minum dan Sambungan Rumah
  - Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kawasan Kumuh
  - Pembangunan / Peningkatan Sarana Persampahan di Kawasan Kumuh
- Program Pembangunan Perumahan Rakyat
- Peningkatan Kualitas Rumah tidak Layak Huni
  - Rekontruksi dan Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana
  - Sosialisasi Rekonstruksi dan Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana
  - Rapat Koordinasi Bidang Perumahan

3. Tingkat pencapaian urusan wajib  
Tidak ada

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah Cpns	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	5	-	5
		Gol. III	31	-	31
		Gol.II	8	-	8
		Gol. I			
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	10	-	10
		S1	22	3	25
		D. IV	2	-	2
		D. III	2	2	4
		D.I	-	-	-
		SMA/ sederajat	7	-	7
		SMP/ sederajat	-	-	-
		SD/ sederajat	-	-	-
III.	Berdasarkan	<b>Struktural:</b>			

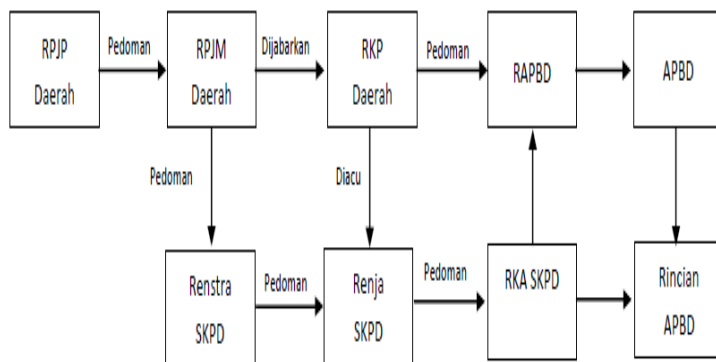


No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah Cpn	Total
	Jabatan	Eselon II	1	-	1
		Eselon III	3	-	3
		Eselon IV	5	-	5
		<b>Fungsional:</b>			
		Tertentu	2	-	2
		Umum	32	5	37
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>43</b>	<b>5</b>	<b>48</b>

## 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.500.305.839,68	208.800.000	15.234.213.017	573.672.793	22.516.991.649,68	21.047.755.139,23	93,48	Dinas Perkim

## 6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



## 7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
-	-	√	-

## 8. Permasalahan dan solusi

### Permasalahan

Ada beberapa permasalahan yang menyebabkan realisasi keuangan tidak maksimal. Hal ini dikarenakan Pada Tahun 2020 akan direncanakan kegiatan pembangunan Gedung Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Gedung Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Gedung Yayasan anak cacat (YPAC), Masjid MAN IC Bangka Tengah, Gedung Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Masjid IAIN SAS Bangka Belitung, Gedung PMI Kepulauan Bangka Baelitung, sehingga perencanaannya dilakukan di tahun anggaran 2019. Namun setelah dilakukan pembahasan antara executive dan legislative keputusan akhir bahwa kegiatan pembangunan Gedung Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Gedung Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Gedung Yayasan anak cacat (YPAC), Masjid MAN IC Bangka Tengah, Gedung Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Masjid IAIN SAS Bangka Belitung, Gedung PMI Kepulauan Bangka Baelitung, dijadikan belanja hibah. Sehingga perencanaan tidak dilaksanakan.

### Solusi

Adapun solusi dari permasalahan diatas adalah perencanaan kegiatan harus dilakukan secara matang dari mulai usulan kegiatan sampai dengan aturan-aturan yang berlaku.

## e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

### • Satuan Polisi Pamong Praja

#### 1. Perangkat Daerah Pelaksana

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Penyelenggara Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### 2. Program dan Kegiatan

##### a. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan

- Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan Disiplin Aparatur
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
- Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

##### b. Program Pembinaan dan Pengembangan Personil Satuan Polisi Pamong Praja

- Pembinaan Peningkatan Personil bagi Satuan Polisi Pamong Praja

- Pengiriman Peserta Bimtek dan Diklat Peningkatan Kompetensi Aparatur
- Pembinaan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
- c. Program Penegakan Perda dan Perkada
  - Penindakan Yustisial terhadap Pelanggar Perda dan Perkada
  - Pembinaan dan Penindakan Non Yustisial terhadap Pelanggar Perda dan Perkada
  - Penatakelolaan Sekretariat PPNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  - Bimtek Pemberkasan PPNS Penegak Perda Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  - Rapat Koordinasi Satpol PP Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan PPNS di Lingkungan Pemprov. Kep. Bangka Belitung
- d. Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
  - Patroli
  - Gelar Pasukan dalam Rangka Peningkatan Penyelenggaraan Tibumtranmas dan Linmas serta Kesiapsiagaan Tim Pemadam Kebakaran
  - Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
  - Penyelenggaraan Deteksi Dini Pelanggaran Tibumtranmas
- e. Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat
  - Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  - Bimtek Pengamanan Pemilu dan Pemilukada bagi Satlinmas Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  - Pendidikan dan Pelatihan Bencana dan Kebakaran bagi Satlinmas
  - Pengurangan Resiko Bencana dan Kebakaran

3. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib  
Tidak ada

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

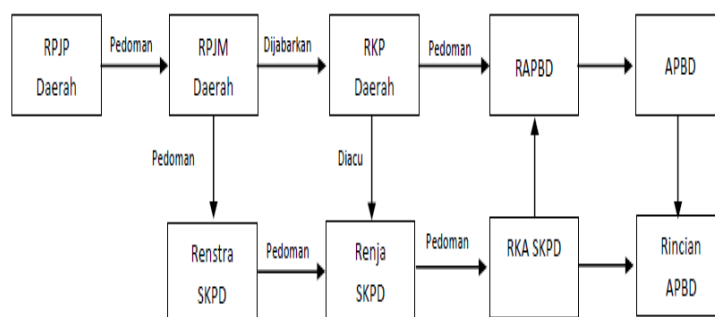
No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	8	-	8
		Gol. III	38		38
		Gol. II	31		31
		Gol. I		-	
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	7	-	7
		S1	35		35

		D. IV	-	-	-
		D. III	-	-	-
		D.I	-	-	-
		SMA/ sederajat	33	-	33
		SMP/ sederajat	-	-	-
		SD/ sederajat	-	-	-
III.	Berdasarkan Jabatan	<b>Struktural:</b>			
		Eselon II	1		1
		Eselon III	5		5
		Eselon IV	11		11
		<b>Fungsional:</b>			
		Tertentu	13		13
		Umum	47		47
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>77</b>

## 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.122.857.555,50	1.127.000.000	635.548.600	282.300.900	8.820.956.200	12.813.028.371	91,9	Satpol PP

## 6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



## 7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, cukup atau Kurang)

Proses Perencanaan	Kondisi sarana dan prasarana			Keterangan
	Lengkap	Kurang	Mencukupi	
Dengan analisa permasalahan berdasarkan tupoksi dan dibahas dalam musrenbang.	-	√	-	

## 8. Permasalahan dan Solusi

### **Permasalahan**

- Kurangnya pegawai Satpol PP yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa.
- Kurangnya SDM di bidang Administrasi Perkantoran dan Teknologi Informasi.
- Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan tugas.
- Belum adanya sarana teknologi informasi berbasis *online* yang mencukupi untuk pelaksanaan tugas yang berbasis komputerisasi.

### **Solusi**

- Ujian Sertifikat Pengadaan barang dan Jasa tetap harus terus diikuti sehingga akhirnya akan didapat Pegawai yang Mempunyai Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sehingga SKPD Satuan Polisi Pamong Praja tidak tergantung dengan Petugas dari SKPD lain yang mempunyai Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa.
- Adanya penambahan formasi pegawai yang berkualitas di bidang Administrasi Perkantoran khususnya di bidang Komputer dan Teknologi Informasi.
- Mengupayakan ketersediaan anggaran untuk penambahan dan perbaikan sarana prasarana penunjang tugas pengamanan Satpol PP di lapangan.
- Mengupayakan sarana dan prasarana penunjang untuk sistem komputerisasi/teknologi informasi berbasis *online* yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi pelaporan dan transparansi informasi SKPD.

## • **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

### 1. Perangkat Daerah Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Gubernur, dipimpin oleh seorang Kepala Badan Eselon Ia yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016, Bab VI pasal 82 ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanggulangan bencana, yang dipimpin oleh kepala pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
- b) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
- c) Pemberian pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana;
- d) Penyampaian informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
- e) Penggunaan dan pertanggungjawaban sumbangan dan/atau bantuan;
- f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

## 2. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2019, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Program Kegiatan sebagai berikut:

### **Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana**

- Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencegahan Banjir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Mitigasi Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana
- Pembekalan Tentang Penanggulangan Bencana Kepada Aparatur Perangkat Daerah, Aparatur Desa/Kelurahan dan Masyarakat
- Publikasi Panduan Standar Minimum Penyelamatan Dini Saat Terjadi Bencana
- Pengurangan Risiko Bencana Dalam Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah
- Kajian Daerah Rawan Bencana di 7 Kabupaten/kota.

### **Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana**

- Bimbingan Teknis Pemulihan Kesehatan Psikis Masyarakat Pasca Bencana Kabupaten/Kota dan Provinsi
- Bimbingan Teknis Aparatur Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dalam Menangani Tindakan Dini Pascabencana
- Pemeliharaan Jembatan Portable
- Bongkar dan atau Pasang Jembatan Portable
- Monitoring dan Evaluasi Pascabencana ke Kabupaten/Kota
- Bimbingan Teknis Kajian Kebutuhan

### **Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana**

- Pos Komando Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Pengerahan dan Mobilisasi Tim Reaksi Cepat

- Pengadaan/Penyediaan Logistik untuk Penanggulangan Bencana
- Pengadaan/Penyediaan Peralatan Untuk Penanggulangan Bencana
- Pemeliharaan/Perawatan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.
- Pengambilan Serta Pendistribusian Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana
- Pelatihan Penguatan Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

3. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Tidak ada

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I	Berdasarkan Pangkat/Gol.	Gol. IV	5	0	5
		Gol. III	21	0	21
		Gol. II	10	0	10
		Gol I	0	0	0
II	Berdasarkan Pendidikan	S3	1	0	1
		S2	1	0	1
		S1	24	0	24
		D IV	0	0	0
		D III	5	0	5
		D II	0	0	0
		D I	0	0	0
		SMA/Sederajat	5	0	5
		SMP/Sederajat	0	0	0
SD/Sederajat	0	0	0		
III	Berdasarkan Jabatan	Struktural			
		• Eselon II	1	0	1
		• Eselon III	4	0	4
		• Eselon IV	9	0	9
		Fungsional			
		• Tertentu	5	0	5
• Umum	17	0	17		

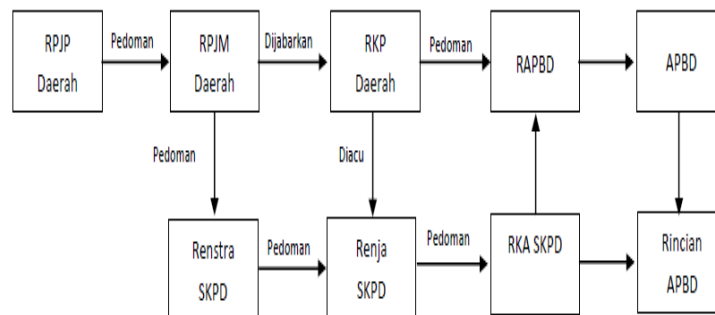
## 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019, yaitu sebesar:

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWA (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.122.057.555,50	1.127.000.000	7.058.407.600	282.300.900	13.943.013.755,50	12.813.028.371,00	91,90	BPBD

## 6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, harus ada keselarasan Program Kegiatan, sebagaimana uraian berikut:



## 7. Kondisi Sarana dan Prasarana

Proses Perencanaan	Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
	Lengkap	Kurang	Mencukupi	
Dengan analisis permasalahan berdasarkan tupoksi BPBD	-	√		

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BPBD memanfaatkan sarana dan prasarana dengan efektif dan efisien, namun masih terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga masih dibutuhkan pengadaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.

## 8. Permasalahan dan Solusi

### Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi organisasi Perangkat Daerah BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dapat diidentifikasi sebagai berikut:



- Koordinasi dalam lintas sektoral penanggulangan bencana belum sangat optimal baik di tingkat Kabupaten dan Kota.
- Masih kurangnya keterbatasan sumber daya manusia seperti halnya pegawai yang kurang dari segi kualitas maupun kuantitas dalam hal kondisi paradok yang di hadapi yang merujuk pada Tugas dan Fungsi yang di sandang sebagai pengelola masalah kebencanaan serta tugas dan fungsi lainnya belum dapat diandalkan.
- Penjabaran dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana belum semuanya teregulasi.
- Masih kurangnya pemahaman aparat pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- Minimnya dukungan anggaran untuk urusan wajib Penanggulangan Bencana (APBD).
- Belum terbentuknya BPBD di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga tidak optimalnya koordinasi apabila terjadi bencana di daerah tersebut, terutama Bangka Selatan.

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut di atas telah dilakukan solusi sebagai berikut:

- Perlu diadakannya rapat koordinasi lintas sektoral penguatan kelembagaan dalam kegiatan peningkatan kapasitas aparatur dalam usaha pengurangan resiko bencana.
- Mengusulkan penambahan pegawai baik melalui rekrutmen dan pindahan dari unit kerja lainnya yang memiliki kemampuan memadai yang sesuai dengan kebutuhan serta mengoptimalkan dan meningkatkan kemampuan aparatur mealalui latihan dan pendidikan baik di bidang penanggulangan bencana dan bidang teknis lainnya.
- Melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait secara intensif untuk menimalisasi kesalahan yang terjadi karena adanya perubahan peraturan-peraturan dan perundang-undangan lainnya.
- Mensosialisasikan masalah kebencanaan baik di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota baik di selenggarakan oleh daerah maupun pusat.
- Mensinergikan penanganan masalah penanggulangan bencana melalui program dan anggaran APBD Provinsi dengan APBD Kabupaten/Kota.
- Melakukan sosialisasi secara intens ke Kabupaten/Kota untuk segera membentuk BPBD di Kabupaten/Kota.

## **f. Sosial**

### **1. Perangkat Daerah Pelaksana**

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

## 2. Program dan Kegiatan

### **Program Pemberdayaan Sosial**

- Pemberdayaan Keluarga
- Penyuluhan Sosial
- Asistensi dan Advokasi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
- Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat
- Peningkatan Pelayanan dan Kesejahteraan Keluarga Pionir
- Program Peningkatan Pelayanan Teknis Panti Sosial
- Pelayanan Psikososial bagi PMKS dipanti Sosial Bina Serumpun
- Peningkatan kualitas pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kessos bagi PMKS
- Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Warga Binaan Sosial di PSBS
- Advokasi dan Pemulangan Klien/Warga Binaan Sosial
- Rehabilitasi Ringan Sarana Prasarana Panti
- Pembangunan Prasarana Panti

### **Program Penguatan Penyelenggaraan Panti Sosial**

- Pendampingan dan Pembinaan Lanjutan Klien
- Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Penghuni Panti
- Pengelolaan Fungsi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti
- Penyediaan Bantuan UEP bagi eks Penghuni Panti
- Penyediaan dan Dukungan Sarana Penunjang Panti
- Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Pengelola Panti

### **Program Rehabilitasi Sosial**

- Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
- Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak
- Pembinaan Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
- Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas
- Pembinaan Sosial Tuna Sosial
- Pertimbangan Perizinan Pengangakatan Anak atau Tim PIPA
- Pendampingan dan Advokasi Sosial Klien bagi Anak Berhadapan dengan Hukum
- Optimalisasi Kinerja Komda Lansia

### **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

- Pengelolaan Posko Kebencanaan Alam
- Pengelolaan Posko Kebencanaan Sosial
- Penguatan Akses Jaminan Sosial Keluarga
- Penguatan Jaminan Sosial Keluarga PKH
- Program Penanganan Fakir Miskin
- Stimulan Penguatan Ekonomi Keluarga Fakir Miskin di Wilayah Pedesaan
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Terhadap Bantuan Rastra BPNT Kepada Keluarga Miskin
- Stimulan Penguatan Sosial Ekonomi Keluarga Miskin dan Rentan

- Peningkatan Kualitas Dukungan Program Pusat

### 3. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Capaian Target Kinerja Tahun 2019 = 100,20 % (data terlampir)

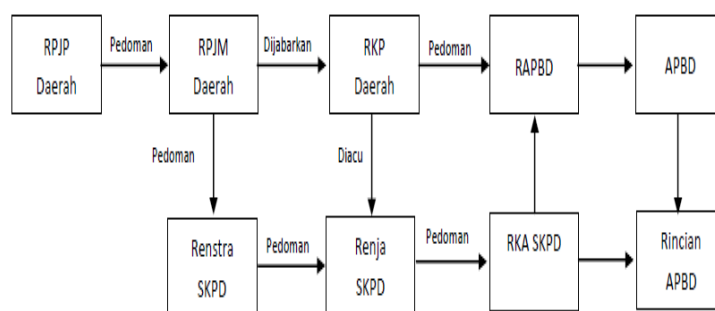
### 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	10		10
		Gol. III	61		61
		Gol. II	16		16
		Gol. I	0		0
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	0		0
		S2	9		9
		S1	43		43
		D. IV	9		9
		D. III	11		11
		D. I	0		0
		SMA/ sederajat	15		15
		SMP/ sederajat	0		0
		SD/ sederajat	0		0
III.	Berdasarkan Jabatan	<b>Struktural:</b>			
		Eselon II	1		1
		Eselon III	7		7
		Eselon IV	20		20
		<b>Fungsional:</b>			
		Tertentu	23		23
		Umum	36		36
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>87</b>		<b>87</b>

### 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12.429.611.712	1.326.266.000	8.415.988.700	1.645.970.000	23.817.836.412	21.779.037.505	91,44	Dinas Sosial

## 6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



## 7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, cukup atau Kurang)

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
-	-	√	-

## 8. Permasalahan dan Solusi

### Permasalahan

Kendala utama yang terjadi adalah karena adanya rasionalisasi pagu anggaran, baik karena efisiensi (pengurangan) rasionalisasi pagu anggaran, maupun terkena penundaan (penghapusan) rasionalisasi kegiatan sehingga berimbas pada pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan;

Proses perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya memperhatikan hubungan erat antara kemampuan pembiayaan perangkat daerah dan penerimaan/pendapatan pemerintah daerah, hal ini berpengaruh kepada konsistensi dan kontinuitas program dan kegiatan pada organisasi perangkat daerah sebagaimana yang sudah dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

Belum optimalnya sinergitas perencanaan dan penganggaran baik pada level pusat-provinsi, provinsi-kabupaten, lintas sektor maupun lintas program/bidang, hal ini menyebabkan pelayanan dan penanganan masalah menjadi kurang maksimal baik efektifitas dan juga pemanfaatannya;

Tidak tersalurkan secara langsung bantuan kepada keluarga miskin masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena mata pencaharian masyarakat yang bidang usahanya musiman atau bekerja dengan orang lain (sebagai buruh) sehingga tidak memungkinkan untuk dibantu dan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lokasi yang terdata

cenderung berubah-ubah sehingga kadang terjadi pergeseran antara data dengan kondisi real di masyarakat;

Kesulitan dalam pengolahan data penerima manfaat ke dalam RKA dalam bentuk *by name by address by need*. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah karena proses penanganan PMKS harus dilakukan sesuai standar atau petunjuk pelaksanaan;

Dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan masih banyak kendala yang di hadapi terutama indikator-indikator kinerja kegiatan yang ingin di capai bukan dalam bentuk orang tetapi jumlah daerah yaitu 7 Kabupaten/kota;

### **Solusi**

Upaya yang dilaksanakan dalam menghadapi kendala/hambatan dalam mencapai sasaran strategis adalah melakukan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan bidang teknis pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **C. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA**

### **b. Hasil EPPD**

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-8840 Tahun 2018 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menduduki peringkat 10 (sepuluh) secara Nasional dan Status Kinerja Tinggi dengan Skor 2,9362, untuk Peringkat dan Status Kinerja Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2018 belum diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

### **c. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah**

Berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tanggal 20 Juni 2019, menurut Opini BPK RI, Laporan Keuangan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (*WTP/unqualified Opinion*), laporan keuangan yang tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 31 Desember 2018 dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan serta ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

## **D. RINGKASAN RAELISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH**

Pengelolaan Keuangan Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah merupakan bagian dari Keuangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3),

a. Penerimaan Daerah terdiri atas:

- Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Total Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 sebesar Rp. 2.694.231.693.655,07.

- Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya dan Penerimaan Pinjaman Daerah. Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 sebesar Rp. 302.270.663.669,62.

b. Pengeluaran Daerah terdiri atas:

- Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Total Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 sebesar Rp. 2.776.102.399.844,58

- Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi Daerah) Pemerintah Daerah. Total realisasi pengeluaran pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 sebesar Rp.0 (tidak ada pengeluaran pembiayaan daerah).